

University of Groningen

Corporate Governance and Managerial Misconduct

Wijayati, Nureni

DOI:
[10.33612/diss.131947533](https://doi.org/10.33612/diss.131947533)

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Wijayati, N. (2020). *Corporate Governance and Managerial Misconduct: Evidence from Indonesia*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
<https://doi.org/10.33612/diss.131947533>

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

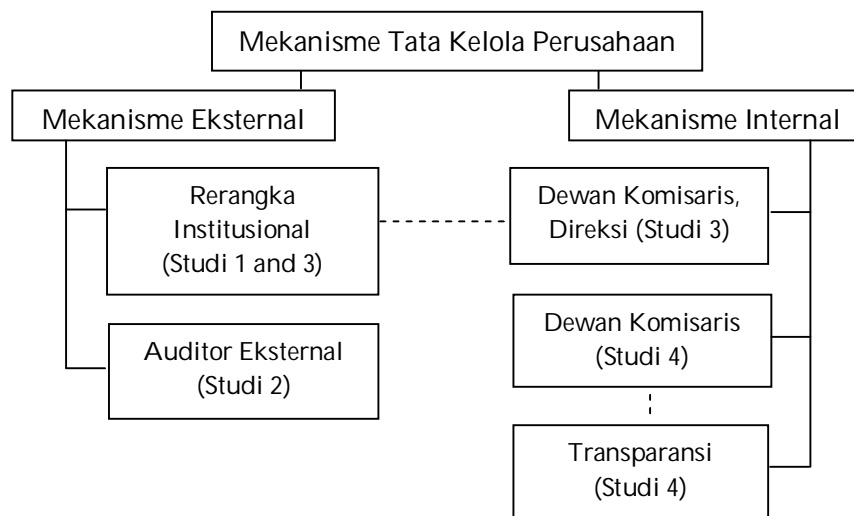
Ringkasan

Tata kelola perusahaan mengacu pada cara-cara dimana para pemangku kepentingan suatu perusahaan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup hubungan formal dan informal antara dewan komisaris dan para pemangku kepentingan yang menentukan bagaimana kepentingan mereka akan dipenuhi, bagaimana manajemen melaporkan kegiatan yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, dan bagaimana kinerja manajemen terkait pemenuhan kepentingan tersebut dimonitor (OECD, 1999). Tulang punggung penelitian tata kelola perusahaan terletak pada teori keagenan yang dikembangkan oleh, diantara yang lain, Jensen dan Meckling (1976). Gagasan utama dari teori mereka adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Teori mereka menekankan bahwa agen (manajer) memiliki kepentingan pribadi, yang dapat menyimpang dari kepentingan pemilik (pemangku kepentingan) perusahaan. Berdasarkan teori ini, Jensen dan Meckling berpendapat bahwa pelaksanaan monitoring yang efektif melalui berbagai mekanisme tata kelola perusahaan harus ditegakkan untuk mencegah perilaku manajer yang kurang baik. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Walsh dan Seward, 1990; Denis dan McConnell 2003). Mekanisme internal berkaitan dengan organ internal perusahaan, seperti dewan komisaris dan pemegang saham, sedangkan mekanisme eksternal melibatkan faktor/pihak eksternal seperti rerangka hukum/peraturan dan pasar modal (Cuervo, 2002; Gillan, 2006; Hanson dan Song, 2006).

Disertasi ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia dapat mengurangi peluang perilaku manajerial yang menyimpang. Sebagai negara berkembang, praktik tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda dengan negara maju. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah meningkatkan praktik tata kelola perusahaan melalui kerangka kerja regulasi yang lebih baik. Namun demikian, Indonesia relatif lebih lambat dalam mereformasi praktik korporasi

dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia Tenggara (ADB, 2017).

Disertasi ini menganalisis dua jenis mekanisme eksternal (yaitu, rerangka institusional dan auditor eksternal), dan dua jenis mekanisme internal (yaitu, karakteristik dewan komisaris dan transparansi). Dari empat studi yang dilakukan, dua studi menyajikan analisis satu jenis mekanisme (Studi 1 dan 2); dan dua studi lainnya menganalisis kombinasi dari dua jenis mekanisme. Hubungan antar berbagai mekanisme dari keempat studi empiris tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Studi 1 menjelaskan mengenai peranan rerangka institusional (mekanisme eksternal) dalam upaya memitigasi/ mencegah peluang korupsi. Studi 2 berkaitan dengan persepsi auditor eksternal (mekanisme eksternal) ketika menilai risiko kecurangan (*fraud*). Studi 3 meneliti interaksi antara dewan komisaris/ direksi (mekanisme internal) dan perubahan rerangka institusional (mekanisme eksternal) (lihat garis putus-putus di gambar 1), dan efek perubahan tersebut terhadap kinerja perusahaan yang komisaris/ direktornya mempunyai hubungan politis dan yang tidak memiliki hubungan politis. Studi 4 menganalisis hubungan antara karakteristik dewan komisaris (mekanisme internal), transparansi (mekanisme internal) (lihat garis putus-

putus di gambar 1), dan manajemen laba. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci untuk masing-masing studi.

Studi pertama (bab 2) meneliti peran rerangka institusional dalam mengendalikan peluang korupsi. Studi ini merupakan studi komparatif tentang rerangka tata kelola perusahaan di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Berpijak pada teori keagenan, kami berpendapat bahwa rerangka institusional tata kelola perusahaan yang kuat dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Tiga komponen tata kelola perusahaan yaitu hak-hak pemegang saham, dewan komisaris, standard akuntansi dan auditing, termasuk transparansi dievaluasi. Temuan utama dari studi komparatif ini adalah, secara umum, rerangka institusional tata kelola perusahaan Indonesia kurang kuat dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, yang mengakibatkan sistem pengawasan menjadi lemah. Karena rerangka institusionalnya kurang memaksa, maka hal ini memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya korupsi.

Studi kedua (bab 3) berfokus pada persepsi auditor eksternal tentang penilaian risiko kecurangan (*fraud*). Survei terhadap 435 auditor eksternal dilakukan, dengan menggunakan studi kasus *vignet* yang diadaptasi dari kasus manipulasi riil di Indonesia. Model penelitian dari studi ini memprediksi bahwa penilaian risiko kecurangan oleh auditor eksternal ditentukan oleh faktor risiko kecurangan (*red flags*), pertimbangan materialitas, skeptisisme profesional, risiko litigasi, dan beberapa karakteristik auditor (seperti sertifikasi, pengalaman kerja, dan ukuran kantor akuntan publik). Studi ini memberikan bukti bahwa faktor risiko kecurangan, pertimbangan materialitas, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap penilaian risiko kecurangan. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pertimbangan materialitas mempengaruhi penilaian risiko kecurangan secara tidak langsung melalui skeptisisme profesional. Temuan ini memiliki implikasi bagi para auditor dan pekerjaan mereka yaitu, penting bagi para auditor untuk mempertahankan perilaku konservatif dengan cara menurunkan batas ambang materialitas. Perilaku tersebut dapat meningkatkan skeptisisme auditor, yang menghasilkan penilaian risiko kecurangan yang lebih baik. Temuan ini dianggap baru dalam literatur audit. Secara keseluruhan,

hasil studi ini menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat ditingkatkan ketika auditor menunjukkan sikap lebih konservatif dan berperilaku lebih skeptis.

Studi ketiga (bab 4) meneliti bagaimana perubahan institusional yang terjadi pada tahun 2004 di Indonesia mempengaruhi nilai perusahaan yang memiliki hubungan politis. Menggunakan teori agensi dan teori ketergantungan sumber daya (*resource dependence*), studi ini merupakan salah satu dari sedikit studi yang menggunakan data longitudinal (2000-2011), yang menginvestigasi dampak perubahan institusional pada kinerja perusahaan yang terkoneksi secara politis. Data penelitian dipecah menjadi periode era pra-demokrasi (2000-2004) dan periode era demokratis (2005-2011), agar dapat dilakukan pengukuran terhadap efek bersih dari perubahan institusional terhadap nilai koneksi politis. Tahun 2004 dianggap sebagai tonggak sejarah demokrasi karena pada tahun tersebut Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan demokratis. Data anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki koneksi politis dari 357 perusahaan publik non-keuangan dikumpulkan secara manual. Hasil empiris menunjukkan bahwa di era demokrasi, efek koneksi politis terhadap kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa nilai koneksi politis menjadi kurang penting setelah Indonesia memasuki rezim yang lebih demokratis yaitu setelah 2004. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan fakta bahwa sejak 2004 telah terjadi pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kekuasaan birokrat pusat menurun, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politis dengan mereka mengalami penurunan kinerja keuangan.

Studi keempat (bab 5) mengeksplorasi hubungan antara dewan komisaris, transparansi dan pengungkapan, dan manajemen laba. Penelitian terdahulu mengasumsikan adanya hubungan langsung antara karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba, sementara penelitian ini berpendapat bahwa hubungan antara dewan komisaris dan manajemen laba bersifat tidak langsung. Karakteristik (input) dewan komisaris menentukan tingkat transparansi dan pengungkapan, yang selanjutnya akan berdampak mengurangi praktik manajemen laba. Tiga *input* (karakteristik) dewan komisaris disusun dengan menggunakan data dari *ASEAN Corporate Governance*

Scorecard, yaitu keahlian, komitmen, dan struktur. Penelitian ini menggunakan sampel 104 perusahaan non-keuangan Indonesia yang terdaftar di bursa efek untuk tahun 2013, 2014, dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian, komitmen, dan struktur tidak terkait langsung dengan manajemen laba; tetapi mereka berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi. Temuan yang paling penting adalah keahlian dewan komisaris dan komitmen dewan komisaris terbukti menurunkan praktik manajemen laba secara tidak langsung melalui pengungkapan wajib, namun tidak melalui pengungkapan sukarela. Hal ini menyiratkan bahwa pengungkapan wajib bertindak sebagai variabel mediasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia belum sepenuhnya mematuhi pengungkapan wajib. Kondisi ini dapat terjadi karena anggota dewan komisaris mungkin kurang efektif dalam hal pengawasan, atau ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa badan pengawas tidak memberikan hukuman atau penalti yang cukup berat kepada perusahaan yang tidak patuh.

Secara keseluruhan, hasil-hasil studi empiris di disertasi ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan baik internal maupun eksternal yang kuat, sangat diperlukan untuk pertumbuhan kinerja perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia. Disertasi ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik memastikan adanya *check and balance* yang diterapkan untuk mencegah kecurangan. Penerapan tata kelola perusahaan sangat penting, memberikan manfaat tidak hanya untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang, tetapi juga untuk perekonomian negara secara keseluruhan. Disertasi ini juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menciptakan kepercayaan publik, yang selanjutnya memungkinkan untuk memberikan daya tarik bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian ini hanya berfokus pada Indonesia, namun demikian kami yakin bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan pelajaran penting bagi negara berkembang lainnya. Analisis yang telah dilakukan dalam disertasi ini dapat direplikasi dalam konteks negara yang berbeda. Peluang untuk penelitian yang akan datang seperti penelitian komparatif antar negara sangat terbuka untuk dilakukan.

